

.....

**DETERMINANSI KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
PERSPEKTIF AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**

Oleh

Febriyan Dina Putri¹, Siska Yulia Defitri², Juita Sukraini³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Solok

Email: [1febriyandinaputri2304@gmail.com](mailto:febriyandinaputri2304@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas (X1) Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y), Pengaruh Transparansi (X2) Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y) dan Partisipasi Publik (X3) Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y), Pengaruh secara simultan Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Publik (X3) Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $2,818 > 1,678$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,007 < 0,05$. sedangkan Transparansi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $2,448 > 1,678$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,018 < 0,05$. kemudian Partisipasi Publik (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $3,616 > 1,678$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,001 < 0,05$. Setelah itu, Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Publik (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y). Hasil ini dibuktikan dengan F_{hitung} sebesar $89,235 > 2,81$. dan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: *Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Publik (X3), Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Y)*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang sangat cepat, maka dari itu pemerintah mulai memperhatikan penilaian praktik manajemen pemerintah, salah satunya dalam kinerja organisasi pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Organisasi Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu

lembaga yang disediakan pemerintah yaitu dengan dibentuknya sistem administrasi dan birokrasi yang bagus sehingga menghasilkan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah patut memiliki kinerja yang mengarah terhadap kepentingan masyarakat dan diharapkan tanggap dengan lingkungannya, karena kinerja organisasi layanan publik yang optimal sanggup membantu pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah berwenang atas pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus di pertanggung jawabkan kinerjanya oleh masing-masing organisasi layanan publik untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Pada dasarnya kinerja organisasi merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kinerja organisasi dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meraih prestasi kerja, serta mewujudkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan organisasi yang profesional dapat meningkatkan kinerja dan mampu mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Untuk meningkatkan kinerja perlu di tetapkan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, anggota atau organisasi secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu seseorang/organisasi dan pemenuhan kebutuhan. Mahmudi (2015;219) pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Organisasi pelayanan publik merupakan organisasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada setiap warga negara, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan membiayai pemberian pelayanan swasta. Warga negara berharap pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan

jujur dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kinerja organisasi layanan publik adalah keluaran/hasil dari kegiatan maupun program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dari suatu instansi yang memberikan pelayanan kepada publik (Wahyu, 2018). Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus memberikan kepuasan kepada publik. Apabila semakin baik kinerja organisasi maka akan semakin baik juga pelayanan public sehingga dapat mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dinegeri sangat dibutuhkan Mahmudi (2015).

Setiap pelaksanaan pemerintahan selalu dikatkan dengan akuntabilitas dalam kinerja layanan publik. hal ini penting untuk diperhatikan agar menjamin efesiensi dan efektivitas pelayanan publik. Akuntabilitas juga berhubungan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas setiap kegiatan dalam pencapaian target kebijakan atau program. Mahmudi (2015;09) akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjalankan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah. Akuntabilitas adalah suatu prinsip dilahirkannya tata kelola menjadi penting dikarenakan menyediakan legitimasi untuk otoritas publik dan organisasi publik (Wardiana, 2019).

Akuntabilitas sebagai bentuk *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam tanggung jawab mengelola sebuah organisasi. Prinsip akuntabilitas dapat diciptakan untuk menciptakan kontrol efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisaris (Arifin, 2014).

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015;224). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, Mardiasmo (2018;23). Transparansi juga memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan karena dengan adanya transparansi maka publik mendapat kesempatan mengetahui kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kushartiningih, 2021).

Transparansi dibutuhkan untuk memajukan kinerja organisasi pemerintah daerah. Transparansi berlandaskan dengan tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai seluruh kebijakan publik dan proses pembentukannya. Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep good governance. Melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik (Triuwono, 2017).

Partisipasi publik merupakan bentuk keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian suatu tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggungjawab bersama. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan suatu keputusan langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut didirikan berlandaskan dasar keleluasaan, berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif Mardiasmo (2018;23). Pelayanan publik yang partisipatif mampu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan ambisi, kepentingan dan harapan

masyarakat. Masyarakat bisa mencurahkan keinginannya melalui lembaga yang berwenang serta menerima keluhan dan permasalahan yang dihadapi untuk ditindak lanjuti dan mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Partisipasi publik yaitu partikel yang tak terpisahkan dari organisasi pelayanan publik, seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pelayanan yang diberikan, hal tersebut didukung dengan Permenpan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran & Bougie 2017;76).

Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran 2011;242). Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Data primer selalu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian. Sumber data dalam penelitian ini pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dengan metode survei ke lapangan, menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah merumuskan set pertanyaan tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban.

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran 2011;64). Populasi tidak hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga tidak sekedar jumlah pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu. Populasi dalam penelitian ini yaitu, Seluruh OPD di Kabupaten Solok dengan responden, Kepala Sub Bagian Keuangan OPD, dan Kepala Sub Bagian Umum pada OPD. Daftar nama populasi dan sampel dicantumkan dalam lampiran penelitian ini.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi dengan kata lain beberapa namun tidak semua elemen populasi dari sampel (Sekaran 2013;241). Jika populasi besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, umpamanya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, hingga peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Dalam penelitian ini penentuan sampel menggunakan metode *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh populasi sebagai responden atau sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu, seluruh OPD di Kabupaten Solok yang terdiri atas, Kepala Sub Bagian Keuangan OPD, dan Kepala Sub Bagian Umum pada OPD. Daftar nama populasi dan sampel dicantumkan dalam lampiran penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kinerja organisasi layanan publik

a = koefisien konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi dari masing-masing variabel

X_1 = akuntabilitas

X_2 = transparansi

X_3 = partisipasi publik

e = koefisien error (variabel pengganggu)

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel lain dianggap konstan. Ghazali (2018;98) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- Jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ dan maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Hartono, 2014;171) adalah :

- Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yang berarti variabel independen (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Uji F

Ghozali (2018;98) uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen secara simultan atau tidak, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

Uji ini dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Hartono, 2014;171) adalah :

- a. Jika nilai $|F \text{ hitung}| \geq F \text{ tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai $|F \text{ hitung}| \leq F \text{ tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Hartono, 2014;171) adalah :

- a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b. Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2018;97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas maka kita menggunakan R square, tetapi apabila jumlah

variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan *adjusted R square* yang nilainya selalu lebih kecil dari R square. Dalam penelitian ini pengujian koefisien menggunakan *adjusted R square*, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Kabupaten Solok adalah sebuah kabupaten di Sumatra barat merupakan wilayah rantau dari Luhak Tanah Datar, yang kemudian terkenal sebagai Luhak Kubung Tigo Baleh. Perpindahan ini diperkirakan terjadi pada abad 13 sampai 14 Masehi. Kabupaten Solok tidaklah daerah baru karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang pembentukan wilayah ini dikeluarkan. Kabupaten Solok memiliki luas wilayah 4.594,23 Km² yang terdiri dari 14 Kecamatan 74 Nagari dan 403 Jorong. Saat ini Pemerintah Kabupaten Solok juga mempunyai beberapa instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjumlah 26 OPD.

Responden dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui distribusi responden jika dilihat dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan, dalam bentuk persentase. Berdasarkan jenis usia, usia 20-29 tahun sebanyak 5 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 10,41%. Sedangkan responden yang masuk kelompok usia 30-39 tahun sebanyak 7 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 14,58%. Dalam kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 16 orang atau dipersentasekan sebanyak 33,33%. Untuk kelompok usia 50-59 tahun sebanyak 20 orang dan dipersentasekan menjadi sebanyak 41,68%. Berdasarkan jenis kelamin responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 43,75%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 56,25%. Untuk tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang atau

yang dipersentasekan sebanyak 4,16%. Dalam tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 36 orang, dipersentasekan menjadi 75%. Setelah itu, responden yang memiliki tingkat pendidikan S2 yaitu sebanyak 7 orang atau dipersentasekan menjadi 14,58%. Sedangkan, dalam tingkat pendidikan S3, tidak ada responden yang memiliki kualifikasi pendidikan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dalam tingkat lain-lain yaitu pendidikan SMA.SMK sebanyak 3 orang atau dipersentasekan sebanyak 6,26%. Berdasarkan jabatan responden yang menduduki jabatan Kasubag Umum sebanyak 24 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 50%. Sedangkan responden yang menduduki jabatan Kasubag Keuangan sebanyak 24 orang atau yang dipersentasekan sebanyak 50%. Adapun untuk deskripsi sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responden.

Tabel 1. Responden Berdasarkan usia

Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase (%)
1. Usia		
a. 20-29 Tahun	5 Orang	10,41%
b. 30-39 Tahun	7 Orang	14,58%
c. 40-49 Tahun	16 Orang	33,33%
d. 50-59 Tahun	20 Orang	41,68%
2. Jenis Kelamin		
a. Laki-Laki	21 Orang	43,75%
b. Perempuan	27 Orang	56,25%
3. Tingkat Pendidikan		
a. D3	2 Orang	4,16%
b. S1	36 Orang	75%
c. S2	7 Orang	14,58%
d. Lain-Lain	3 Orang	6,26%
4. Jabatan		
a. Kasubag Keuangan	24 Orang	50%
b. Kasubag Umum	24 Orang	50%

Sumber: Data primer, diolah 2022

Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini diketahui keseluruhan item dalam instrument penelitian ini dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Begitu juga untuk uji reliabilitas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan kuesioner sudah melengkapi persyaratan reliabilitas yaitu nilai *Cronbach alpha* > 0,70.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk melihat perubahan nilai variabel variabel dependen jika nilai variabel dependen di naik turunkan.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	B		
1 (Constant)	9,151		1,393	6,569	0,000
Akuntabilitas (X1)	0,288	0,102		2,818	0,007
Transparansi (X2)	0,223	0,091		2,448	0,018
Partisipasi publik (X3)	0,340	0,094		3,616	0,001

a. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y)

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 23.00

Dari tabel 2. uji regresi linier berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,151 + 0,288 X1 + 0,223 X2 + 0,340 X3 + e$$

Persamaan regresi berganda diatas, diketahui memiliki konstantan sebesar 9,151 dengan tanda positif. Sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Publik (X3) diasumsikan bernilai = 0, maka variabel dependen yaitu Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y) dalam kondisi ini sudah ada sebesar 9,151 satuan.

Koefisien regresi Akuntabilitas (X1) sebesar 0,288 adalah positif. Artinya terjadi hubungan positif antara Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Jika terjadi peningkatan satu satuan variabel Akuntabilitas (X1) dengan menganggap nilai Transparansi (X2) dan Partisipasi Publik (X3) bernilai tetap atau nol, maka Kinerja organisasi layanan publik (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,288 satuan.

Koefisien regresi Transparansi (X2) sebesar 0,223 adalah positif. Artinya terjadi hubungan positif antara Transparansi (X2) terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Jika terjadi peningkatan satu satuan variabel Transparansi (X2) dengan menganggap nilai Akuntabilitas (X1) dan Partisipasi Publik (X3) bernilai tetap, maka

Kinerja organisasi layanan publik (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,223 satuan.

Koefisien regresi Partisipasi Publik (X3) sebesar 0,340 adalah positif. Artinya terjadi hubungan positif antara partisipasi publik (X3) terhadap Kinerja organisasi layanan publik (Y). Jika terjadi peningkatan satu satuan variabel Partisipasi Publik (X3) dengan menganggap Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) bernilai tetap, maka Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,340 satuan.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Untuk menguji pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas digunakan uji t. Ghazali (2018;98) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 2, hipotesis pertama (H1) diterima yaitu adanya pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,678$, yaitu t_{hitung} sebesar $2,818 > 1,678$. Selain itu, hipotesis pertama dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar 0,05, yaitu nilai signifikansi t sebesar $0,007 < 0,05$.

Berdasarkan tabel 2, hipotesis kedua (H2) diterima yaitu adanya pengaruh Transparansi (X2) terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,678$, yaitu t_{hitung} sebesar $2,448 > 1,678$. Selain itu, hipotesis kedua dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar 0,05, yaitu nilai signifikansi t sebesar $0,018 < 0,05$.

Berdasarkan tabel 5, hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu adanya pengaruh Partisipasi Publik (X3) terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,678$, yaitu t_{hitung} sebesar $3,616 > 1,678$. Selain itu, hipotesis ketiga dapat dibuktikan

dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar 0,05, yaitu nilai signifikansi t sebesar $0,001 < 0,05$.

Uji F

Untuk menguji apakah variabel bebas secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	888,882	3	296,294	89,235	,000 ^b
Residual	146,097	44	3,320		
Total	1034,979	47			

a. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y)
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Publik (X3), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 23.00

Berdasarkan tabel 3, hipotesis keempat (H4) diterima yaitu adanya pengaruh Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Partisipasi Publik (X3) secara simultan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai ketentuan $F_{Tabel} = 2,81$, yaitu F_{hitung} sebesar $89,235 > 2,81$. Selain itu, hipotesis keempat dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar 0,05, yaitu nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$.

Koefisien Determinansi (R^2)

Pada intinya koefisien determinansi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam mengukur variabel dependen. Penelitian ini untuk koefisiensi menggunakan *adjusted R square*, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua variabel.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinansi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,927 ^a	0,859	0,849	1,822

a. Predictors: (Constant), Partisipasi (X3), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 23.00

Dari tabel 4 diatas diketahui bahwa *adjusted R square* sebesar 0,849 atau 84,9%. Hal ini berarti 84,9% dari variabel dependen yaitu Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y) dipengaruhi oleh variabel independen yaitu

Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Partisipasi Publik (X3). Sedangkan 15,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Pengawasan (Kushartiningasih, 2021), Partisipasi Anggaran (Safitri, 2019), Budaya Organisasi (Indarwati, 2017), dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pertama (H1), dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,678$, yaitu t_{hitung} sebesar $2,818 > 1,678$. Selain itu, hipotesis pertama dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikan sebesar 0,05 yaitu nilai signifikan t sebesar $0,007 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winirpin (2015), bahwa adanya hubungan yang signifikan Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Indarwati (2017) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila akuntabilitas diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah, maka akan meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik. Akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas menyediakan legitimasi untuk otoritas publik dan organisasi publik. Akuntabilitas sebagai bentuk *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam tanggung jawab mengelola sebuah organisasi. Oleh karena itu, maka

akuntabilitas harus diterapkan di organisasi layanan publik, agar kinerja organisasi layanan publik menjadi meningkat.

Berdasarkan penelitian yang diteliti di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Akuntabilitas sudah dilaksanakan di beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan pelayanan publik, seperti pengurusan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, pelayanan bantuan bibit pertanian gratis di Dinas Pertanian, Pelayanan PKH, bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial, dan lain-lain.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis hipotesis kedua (H2), dapat diketahui bahwa adanya pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan, dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,678$, yaitu t_{hitung} sebesar $2,448 > 1,678$. Selain itu, hipotesis kedua dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar 0,05, yaitu nilai signifikansi t sebesar $0,018 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Hidayat (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara transparansi terhadap kinerja organisasi layanan publik. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Putra (2014), yang mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apabila transparansi diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah, maka akan meningkatkan kinerja organisasi layanan publik. Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi layanan publik. Transparansi dilandasi dengan tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai seluruh kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan demikian, masyarakat mampu mengetahui serta mengawasi sehingga kebijakan publik dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, maka transparansi harus diterapkan pada organisasi layanan publik, agar kinerja organisasi layanan publik menjadi lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang diteliti di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Solok, transparansi sudah dilaksanakan di beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya masyarakat Kabupaten Solok dalam memperoleh informasi tentang pelayanan publik, seperti informasi syarat-syarat dan prosedur pengurusan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, informasi syarat-syarat dan prosedur pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, dan lain-lain.

Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis hipotesis ketiga (H3), dapat diketahui bahwa adanya pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan, dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,678$, yaitu t_{hitung} sebesar $3,616 > 1,678$. Selain itu, hipotesis ketiga dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar $0,05$, yaitu nilai signifikansi t sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wahyu (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Partisipasi Publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik. Hasil penelitian ini bertolak

belakang dengan hasil penelitian dari Hidayat (2016) yang mengungkapkan bahwa Partisipasi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, apabila partisipasi publik meningkat, maka akan meningkatkan kinerja organisasi layanan publik. Partisipasi publik merupakan bentuk keikutsertaan suatu badan atau anggota dalam pencapaian suatu tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggungjawab bersama. Partisipasi publik memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk ikut serta dan bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Partisipasi publik bertujuan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta memberikan donasi sehingga kegiatan berjalan lebih positif, tepat, dan berkelanjutan. Pelayanan publik yang partisipatif mampu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Masyarakat mampu menyalurkan keinginannya melalui lembaga yang berwenang serta menerima keluhan atau permasalahan yang dihadapi untuk ditindak lanjuti dan mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu, maka masyarakat diharapkan lebih aktif dalam Partisipasi Publik agar Kinerja Organisasi Layanan Publik menjadi lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang diteliti di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Solok, Partisipasi Publik sangat aktif dalam menilai kinerja pelayanan publik di beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan respon masyarakat Kabupaten Solok yang aktif dalam mengisi kotak saran yang terdapat di beberapa OPD, seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, dan lain-lain.

Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa nilai adanya pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik secara simultan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan, dengan nilai ketentuan $F_{Tabel} = 2,81$, yaitu F_{hitung} sebesar $89,235 > 2,81$. Selain itu, hipotesis keempat dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar $0,05$, yaitu nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Putra, 2014) yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Publik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, apabila Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik meningkat, maka akan meningkatkan Kinerja Organisasi Layanan Publik. Akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas menyediakan legitimasi untuk otoritas publik dan organisasi publik. Akuntabilitas sebagai bentuk *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam tanggung jawab mengelola sebuah organisasi. Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik

seara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi layanan publik. Partisipasi public merupakan keikutsertaan suatu badan atau anggota dalam pencapaian suatu tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggungjawab bersama. Partisipasi publik memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk ikut serta dan bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Tujuan Partisipasi Publik adalah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ditemui dengan melibatkan publik/masyarakat untuk ikut serta memberikan donasi sehingga kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pelayanan publik yang partisipatif mampu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, maka Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik harus meningkat, agar Kinerja Organisasi Layanan Publik juga meningkat.

Berdasarkan penelitian yang diteliti di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Solok, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi publik sudah dilaksanakan di beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Solok. Penerapan akuntabilitas dapat dibuktikan dengan kemudahan pelayanan publik, seperti pengurusan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, pelayanan bantuan bibit pertanian gratis di Dinas Pertanian, pelayanan PKH, bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial, dan lain-lain.

Selain itu, pelaksanaan transparansi dapat dibuktikan dengan mudahnya masyarakat Kabupaten Solok dalam memperoleh informasi tentang pelayanan publik, seperti informasi syarat-syarat dan prosedur pengurusan E-KTP di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, informasi syarat-syarat dan prosedur pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, dan lain-lain.

Keaktifan Partisipasi Publik dapat dibuktikan dengan respon masyarakat Kabupaten Solok yang aktif dalam mengisi kotak saran yang terdapat di beberapa OPD, seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, dan lain-lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu Akuntabilitas (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat akuntabilitas diterapkan dalam organisasi layanan publik, maka akan meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, yaitu Transparansi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat transparansi diterapkan dalam organisasi layanan publik, maka akan meningkatkan kinerja organisasi layanan publik.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu Partisipasi Publik (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa,

semakin meningkat partisipasi publik dalam menilai kinerja layanan organisasi publik, maka akan meningkatkan kinerja organisasi layanan publik.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima, yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Partisipasi Publik (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Y). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Semakin meningkat Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik dalam organisasi layanan publik, maka akan meningkatkan Kinerja Organisasi Layanan Publik.

Saran

Adapun saran-saran yang akan diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di OPD Pemerintah Kabupaten Solok, disarankan kepada seluruh OPD di Kabupaten Solok untuk lebih meningkatkan lagi tingkat akuntabilitas agar kinerja pelayanan publiknya bisa lebih baik, seperti memberikan bimbingan teknis pelayanan publik kepada pegawai, menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelayanan publik.
2. Berdasarkan hasil penelitian di OPD Pemerintah Kabupaten Solok, disarankan kepada seluruh OPD di Kabupaten Solok untuk meningkatkan lagi transparansi dalam layanan publik, serta melibatkan partisipasi publik dalam layanan publik agar pelayanan publiknya bisa lebih baik, seperti menyediakan layanan pengaduan *online* tentang pelayanan publik, menyediakan informasi tentang pelayanan public masing-masing OPD di media sosial/*online*.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Pengawasan dan lain-lain. Selain itu, juga disarankan memperluas sampel

dan lokasi penelitiannya agar hasil penelitian menjadi akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, A. Z. (2014). Pengaruh budaya organisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi publik (studi pada rumah sakit daerah massenrempulu, Kabupaten Enrekang). *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Hasanuddin*.
- [2] Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- [3] Dr. Harbani Pasalong, M. S. (2019). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan ke). alfabeta.
- [4] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- [5] Hartono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data* (Edisi ke 2).
- [6] Hidayat, N. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik*. Universitas Negeri Padang.
- [7] Indarwati, S. (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah HA Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- [8] Iswahyudi, A., & Triyuwono, I. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2).
- [9] Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- [10] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi ke t). UPP STIM YKPN.
- [11] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- [12] Putra, H. G. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- [13] Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3).
- [14] Sekaran, U. (2011). *Research Method For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. In *Salemba Empat. Jakarta*.
- [15] Sekaran, U. (2013). Edisi 5, *Research Method For Business: A skill Building Approach*. Jhon Wiley@Spsn. New York.
- [15] Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian Buku 2*.
- [16] Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- [17] Ulum, I. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Bumi Aksara.
- [18] Wahyu, S. R. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik Di Rsud Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- [19] Wardiana, I. A., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi dan di Mediasi Motivasi Terhadap Kinerja Organisasi. *Akuntabilitas*, 12(1), 129–144.
- [20] Wirnipin, K. S., Adiputra, I. M. P., SE, S. H., Yuniarta, G. A., & AK, S. E. (2015). Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 3(1).